

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAB. PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**



**PESISIR SELATAN
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang atas berkat dan rahmatNya Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan, atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam membantu Bupati Pesisir Selatan menyelenggarakan pemerintahan di bidang Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 4 Tahun 2014.

Dalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dalam tahun 2015, yang meliputi kinerja atas tiga pilar utama kebijakan nasional di bidang pendidikan yaitu: (1) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan (2) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan; dan (3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik. Selain itu, juga mengacu pada lima misi Pendidikan Nasional yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, kesetaraan dan kapasitas Layanan Pendidikan.

Dengan dukungan alokasi anggaran pendidikan, yang setiap tahun secara bertahap terus diupayakan dan ditingkatkan oleh Pemerintah, bersama Dewan perwakilan Rakyat Daerah, secara bertahap pula telah dilaksanakan berbagai program pembangunan pendidikan nasional, guna merealisasikan target-target pembangunan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, serta Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2015

Melalui laporan ini, Dinas Pendidikan berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pembangunan bidang pendidikan tahun 2014, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan nasional pada tahun-tahun mendatang.

Painan, 31 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd

NIP. 195912311985121005

BAB I

PENDAHULUAN

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dibuat sebagai implementasi Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik (Renstra) . Dalam LAKIP ini disajikan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2017. Penyusunan LAKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahannegara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*goodgovernance*”. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2017 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil Pelaksanaan Kegiatan untuk pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 ini yang bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas Instansi beserta seluruh jajarannya kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah, oleh sebab itu LAKIP merupakan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan/dikerjakan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan maksud sebagai evaluasi kinerja , umpan balik peningkatan kinerja, peningkatan perencanaan/program di bidang pembangunan pendidikan, meningkatkan kredibilitas instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati Pesisir Selatan dan mengetahui/menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pada gilirannya menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Disadari bahwa pembangunan bidang pendidikan adalah masalah yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi serta melibatkan berbagai pihak dengan permasalahan yang sangat kompleks

Sejalan dengan semangat Desentralisasi dan Otonomi di bidang Pendidikan kiranya dapat dilaksanakan pembangunan secara bertahap, terencana, sistematis, dan terkoordinasi antara Dinas dan Instansi terkait dengan melibatkan segenap unsur masyarakat dan stakeholders.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan PERDA Kabupaten Pesisir selatan nomor 4 tahun 2014 memiliki struktur organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Bidang Pendidikan TK/SD dan SMP yang terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK/SD
 - b. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP
 - c. Seksi Tenaga Teknis TK/SD dan SMP
4. Bidang Pendidikan SMA/SMK terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMA
 - b. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMK
 - c. Seksi Tenaga Teknis SMA/SMK
5. Bidang Sarana Prasarana , terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD
 - c. Seksi Saranadan PrasaranaSMP dan SMA/SMK
6. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Kesiswaan dan dan Keaksaraan
 - b. Seksi Dikmas dan Kesetaraan
 - c. Seksi Pendidikan anak usia dini
7. Kepala Bidang Kebudayaan

- a. Seksi Adat dan Budaya Tradisional Daerah
 - b. Kepala Seksi Seni dan Film
 - c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
8. Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di Kecamatan
 9. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pesisir Selatan
 10. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :
 - a. Pengawas TK/SD
 - b. Pengawas SLTP/SM
 - c. Tenaga Pengajar/Guru atau Tenaga Kependidikan lainnya
 - d. Penilik Pendidikan luar Sekolah,Generasi Muda dan Olahraga

C. ISU STRATEGIS

Dalam menganalisis lingkungan strategis pendidikan di Kab. Pesisir Selatan perlu memahami faktor-faktor kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman dalam pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal diartikan sebagai upaya untuk mengetahui segala hal yang menyangkut faktor kekuatan , kelemahan yang dimiliki, serta peluang kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi selama melakukan program pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1. Kekuatan (strengths) pada pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya adalah :
 - a. Adanya perhatian dan dukungan berbagai pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam program pembangunan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Adanya motivasi dan dedikasi Pengelolah Pendidikan serta tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
 - c. Adanya perhatian dan dukungan masyarakat terhadap pembangunan pada bidang pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Kelemahan (weakness) Pembangunan Bidang Pendidikan di Kab. Pesisir Selatan diantaranya adalah :
 - a. Tenaga kependidikan khususnya guru masih banyak yang kurang profesional di dalam melaksanakan tugasnya dengan berbagai indikator, antara lain : (1)

- kurang memahami bidang studi yang diajarkannya, (2) kurang memahami Kurikulum, (3) kurang memahami metode mengajar, (4) wawasannya kurang luas.
- b. Kepala Sekolah masih banyak yang kurang profesional dalam melaksanakan tugas dengan berbagai indikator, diantaranya ; (1) Kurang bertanggung jawab dan kurang berani dalam pengambilan keputusan, (2) kurang bersifat inovator, motivator, organisator, dan dinamisator dalam mengelola sekolah, (3) kurang menguasai perencanaan sekolah, kepemimpinan, pengelolaan keuangan dan hubungan sekolah dengan masyarakat.
 - c. Belum terciptanya budaya membaca baik di kalangan tenaga kependidikan maupun siswa.
 - d. Belum memadainya sarana & prasarana pendidikan terutama komputer dan peralatan labor yang merupakan komponen pendukung peningkatan kualitas hasil pembelajaran dan keterampilan siswa.
3. Peluang (opportunities) dari lingkungan eksternal terhadap pembangunan pendidikan di Kab. Pesisir Selatan, diantaranya adalah :
- a. Kondisi letak geografis kabupaten Pesisir Selatan yang strategis mudah dijangkau oleh masyarakat luas dengan berbagai alat transportasi membawa kemudahan dan peluang bagi siapa saja atau lembaga/organisasi lain untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan akan membawa perkembangan kebutuhan yang tidak mustahil dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - b. Kepercayaan orang tua / masyarakat dan pemerintah terhadap pembangunan bidang pendidikan membawa peluang untuk memberi peluang untuk menghimpun dana dan kerjasama dalam membangun dan mengembangkan kualitas SDM.
 - c. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk memodernisasi pengelolaan pendidikan.
4. Tantangan/Ancaman (threats) dari lingkungan eksternal terhadap pembangunan Bidang Pendidikan di Kab. Pesisir Selatan, diantaranya adalah :
- a. Adanya tuntutan masyarakat tentang manajemen pendidikan yang terbuka, demokratis dan profesional serta hasil pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan stakeholders.

- b. Timbulnya budaya sekularisme masyarakat yang mengakibatkan kurangnya masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam setiap kehidupan.
- c. Untuk memasuki perguruan tinggi tempat yang terbatas, maka menuntut kualitas dan kompetisi yang ketat.
- d. Diperlukannya dana yang cukup banyak untuk penyediaan sarana / prasarana belajar terutama penyediaan perpustakaan, laboratorium, komputer dan sarana pendidikan lainnya.

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. VISI DAN MISI

Program pembangunan pendidikan merupakan usaha peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan masyarakat Indonesia yang dilaksanakan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan Nasional dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Sejalan dengan visi pembangunan nasional yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hokum dan lingkungan menguasai IPTEK dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan visi dan misinya seperti terlihat dalam uraian berikut ini :

A. VISI :

**“ Terwujudnya Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Kompetitif
Dan Berakhlak Mulia Melalui Pelayanan Pendidikan
Yang Prima ”**

B. MISI :

Untuk mewujudkan visi pendidikan, di kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan misi menjadi sasaran pembangunan pendidikan yaitu sebagai berikut :

1. Memperluas akses Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalisme Tenaga Kependidikan
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah
4. Mengembangkan partisipasi masyarakat di Bidang Pendidikan
5. Meningkatkan penataan manajemen Pendidikan

2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendidikan serta tugas-tugas pembantu dan kewenangan lainnya yang tidak diatur dalam kewenangan Pusat dan Propinsi diantaranya :

- a. Merumuskan Program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan mulai TK, SD, SLTP ,SLTA Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Kesetaraan.
- c. Pengaturan dan menyelenggarakan pendidikan luar sekolah.
- d. Pengaturan dan pengawasan penerimaan siswa, keuangan, tenaga teknis, kurikulum dan sarana.
- e. Merencanakan kebutuhan guru dan pegawai serta sarana dan prasarana pendidikan.
- f. Melaksanakan peningkatan kemampuan guru melalui pendidikan dan pelatihan.
- g. Memberikan izin pendirian / pembukaan lembaga pendidikan / kursus yang dilaksanakan swasta.
- h. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis di bidang pendidikan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dari fungsi dan wewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka tujuan dan sasaran pendidikan antara lain :

1) Tujuan Pembangunan Pendidikan Pra Sekolah.

- a. Memperluas jangkauan dan daya tampung lembaga prioritas pra sekolah sehingga menjangkau anak-anak di pedesaan.
- b. Meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat miskin dan anak terlantar.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan pra sekolah dengan kualitas yang memadai.

- d. Terselenggaranya manajemen pendidikan pra sekolah berbasis sekolah dan masyarakat (school and community basic manajemen).

Sasaran :

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran program pra sekolah akan ditingkatkan pelayanan yang lebih merata, daya tampung PAUD dan TK/RA di tingkatkan sehingga dapat menampung anak usia 4–5 Tahun .

2) Tujuan Pembangunan Pendidikan Dasar.

- a. Memperluas jangkauan dan daya tampung SD/MI dan SMP/MTs sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh lapisan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk yang berada di daerah terpencil, masyarakat miskin dan anak yang berkelainan.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dengan kualitas yang memadai.
- d. Terselenggaranya manajemen pendidikan dasar berbasis sekolah (School Base Manajemen).

Sasaran :

Sasaran utama Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs) ditujukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program wajar 9 tahun dengan perluasan kesempatan anak usia 7 – 15 tahun untuk mengenyam bangku sekolah.

3) Tujuan Pembangunan Pendidikan Menengah.

Tujuan utama Pendidikan Menengah adalah untuk :

- a. Memperluas jangkauan dan daya tampung SMA/SMK dan MA sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh lapisan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk yang berada di daerah terpencil, masyarakat miskin dan anak yang berkelainan.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dengan kualitas yang memadai.
- d. Terselenggaranya manajemen pendidikan dasar berbasis sekolah (School Base Manajemen).

- e. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan yang tersedia.
- f. Meningkatkan efektifitas pendidikan sesuai dengan ketentuan dan kondisi setempat.
- g. Meningkatkan kinerja personil dan lembaga pendidikan.
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pendidikan.
- i. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Sasaran :

Sasaran program pembangunan Pendidikan Menengah ialah :

- a. Meningkatkan APK Pendidikan SLTA .
- b. Meningkatkan daya tampung lulusan SMP/MTs hasil penuntasan program wajar Dikdas 9 tahun .
- c. Terwujudnya organisasi sekolah yang lebih demokratis, transparan, efisiensi, terakuntabilkan serta mendorong partisipasi masyarakat.
- d. Terwujudnya manajemen pendidikan berbasis sekolah (School Basic Manajemen) dengan mengenalkan konsep dan merintis Dewan Sekolah di tingkat Kabupaten serta memberdayakan atau pembentukan Komite Sekolah.

4. Tujuan Program Pembangunan PLS sebagai Berikut :

- a. Memperluas, pemeratakan serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak usia dini (0 – 6 th) melalui program yang mengintervensi kesehatan, gizi dan perkembangan psikososialnya sehingga ada kesiapan anak pada usia masuk sekolah.
- b. Memperluas, meratakan serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar dengan prioritas usia (7 – 12 th) sehingga mempercepat penuntasan program WAJAR 9 Tahun.
- c. Memperluas, pemeratakan serta meningkatkan pelayanan pendidikan masyarakat buta aksara, utama usia 10 – 40 tahun melalui program keaksaraan fungsional, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendidikan dan berdampak pada sukses WAJAR 9 Tahun.

- d. Meperluas, pemeratakan serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan ketrampilan berkelanjutan bagi masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri bekerja mencari nafkah bagi masyarakat yang tergolong miskin dan menganggur dan atau bagi yang berkeinginan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam memprakarsai dan melembagakan penyelenggaraan PLS sehingga terbentuk pusat – pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang dikelola oleh masyarakat.

Sasaran :

- A. Anak usia dini 0 – 6 tahun yang belum terlayani program apapun terutama pendidikan.
- B. Penduduk yang belum menyelesaikan Dikas, prioritas usia 7 – 15 tahun.
- C. Penduduk yang masih buta aksara, prioritas usia 10 - 44 tahun.
- D. Penduduk yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi.
- E. Masyarakat terdidik, ormas dan lembaga swadaya masyarakat sebagai pemrakarsa dan penyelenggara program PLS yang melembaga dan mengakar pada masyarakat melalui PKBM dan Kursus.

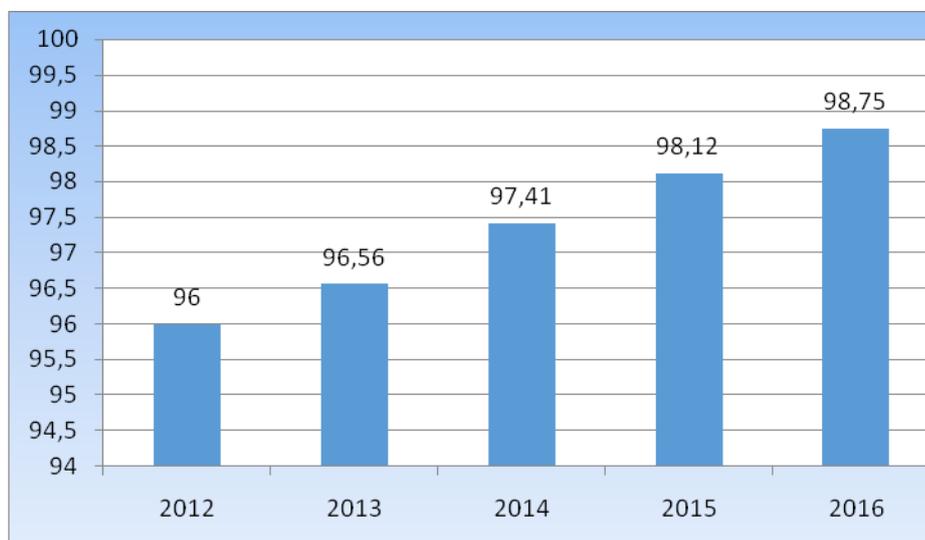
intah untuk terus berupaya mencari terobosan agar kualitas pendidikan dapat ditingkatkan.

Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf menggambarkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur dari aspek pendidikan. Indikator AMH diambil dari penduduk dewasa (umur 15 tahun keatas) yang dapat membaca dan menulis minimal kata-kata/kalimat sederhana aksara tertentu, baik huruf latin atau lainnya

Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Pesisir Selatan pada periode tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 AMH Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 98.12 % dan pada tahun 2017 meningkat sebesar **98.28%**. Kenaikan ini disebabkan adanya program untuk pengentasan buta huruf di masyarakat seperti kegiatan Keaksaraan Fungsional yaitu Keusahaan Mandiri (KUM) dan Pemusatan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM). Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2012 – 2016 sebagaimana Grafik 4.1 berikut:

Grafik 4.1
Perkembangan Angka Melek Huruf
Tahun 2012-2016

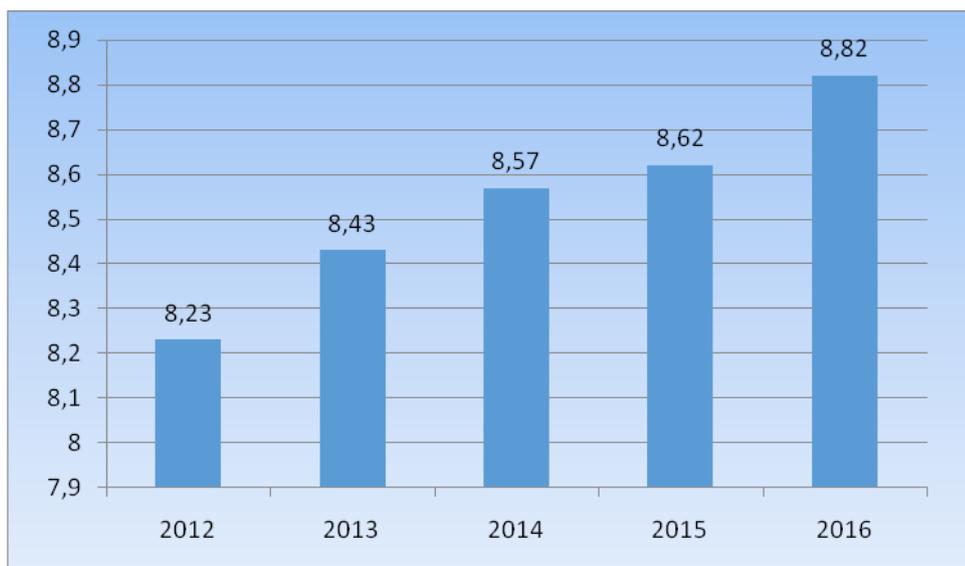


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan, 2017

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan pada periode tahun 2011 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah sebesar 8,21 tahun dan naik menjadi 8,62 pada tahun 2017. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk menaikkan rata-rata lama sekolah sudah efektif. Gambaran rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana Grafik 4.2 berikut:

Grafik 4.2
Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 2011-2017



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan, 2017

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator APK dan APM dipakai untuk melihat seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. Nilai lain yang sering dipergunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Secara umum indikator-indikator ini menunjukkan seberapa besar program-program yang dicanangkan oleh pemerintah telah berhasil seperti wajib belajar 9 tahun.

Tabel 4.2
Perkembangan APK Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Ajaran 2011 – 2017

NO	JENJANG (USIA)	2010	2011	2012	2013	2014	2017
1	SD/MI/PAKET A (7 - 12)	124,95	124,98	124,82	124,92	124,94	124,22
2	SMP/MTS/PAKET B (13-15)	98,15	98,15	98,42	98,90	98, 97	101,61
3	SMA/SMK/MA/PAKET C (16- 18)	74,18	74,29	82,97	83,03	83,21	92,52

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan, 2017

Tabel 4.3
Perkembangan APM Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Ajaran 2010 – 2017

NO	JENJANG (USIA)	2010	2011	2012	2013	2014	2017
1	SD/MI/PAKET A (7 - 12)	98,06	98,22	98,87	98,91	98,96	99,12
	SMP/MTS/PAKET B (13-15)	83,54	84,79	85,14	86,86	87,13	89,90

2							
3	SMA/SMK/MA/PAKET C (16-18)	63,05	66,45	69,50	72,08	73,24	77,82

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan, 2017

Peningkatan pendidikan terlihat dari perkembangan APK dan APM, dimana untuk jenjang SMA/SMK/MA/Paket C APK tahun 2014 sebesar 83,21% dan untuk tahun 2017 naik menjadi 92,52%. Untuk APM jenjang SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2014 sebesar 73,24 % menjadi 77,82% di Tahun 2017.

Angka Putus Sekolah (APS)

Angka putus Sekolah SD, SMP dan SMA kabupaten pesisir Selatan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.4. Angka putus sekolah SD tahun 2011 sebesar 0,13%, SMP sebesar 0,23% dan SMA sebesar 0,32%, sedangkan Angka Putus sekolah SD tahun 2017 sebesar 0,07%, SMP 0,11% dan SMA sebesar 0,16%. Penurunan diatas sangat di pengaruhi oleh kesejahteraan masyarakat pesisir selatan.

Tabel 4.4
Angka Putus Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2011 - 2017

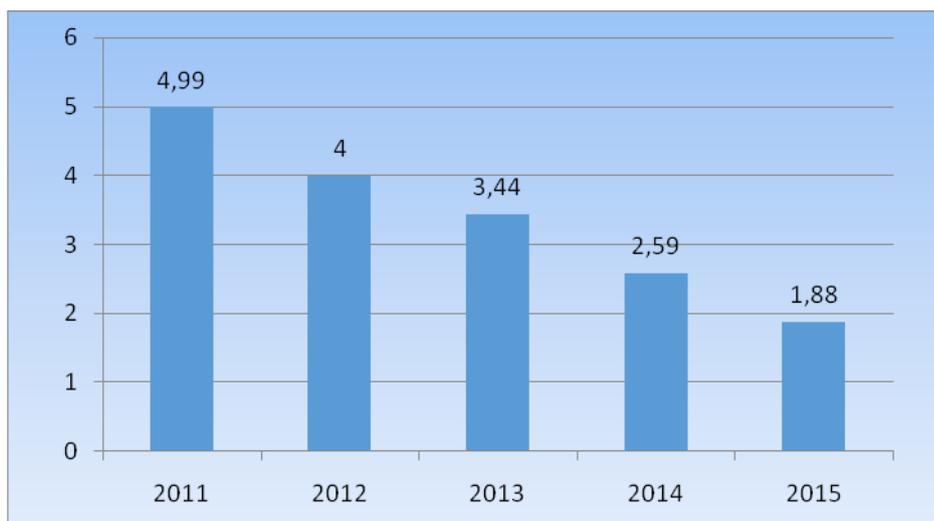
Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2017
SD	0,13	0,11	0,10	0,07	0,07
SMP	0,23	0,19	0,16	0,11	0,11
SMA	0,32	0,25	0,20	0,15	0,16

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan, 2017

Angka Buta Huruf (> 15 tahun keatas)

Angka buta huruf >15 tahun kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011-2017 mengalami penurunan yang signifikan (grafik 4.3). Angka buta huruf pada tahun 2011 sebesar 4.99 kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1.88. Penurunan angka butuf huruf ini dapat dicapai dengan program paket A,Paket B dan Paket C dan pendidikan Keaksaraan yang melibatkan PKBM. Disamping itu penurunan Angka Buta Huruf tidak lepas dari jasa tenaga pendidik yang biasa disebut tutor yang bertugas memberikan layanan maksimal untuk meningkatkan kemaslahatan bagi warga belajarnya.

Grafik 4.3
Angka Buta Huruf
Tahun 2011-2017



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah telah merencanakan dan menjalankan berbagai kebijaksanaan guna memacu peningkatan kecerdasan bangsa dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara lain dengan program wajib belajar 9 tahun. Pada jenjang pendidikan dasar. Tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 160 Kegiatan yang termasuk dalam 11 Program. Alokasi dana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 108.841.604.456 Realisasi Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 107.206.430.621 atau sekitar 98,50%.

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

**Tabel 4.5
Urusan Pendidikan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Belanja (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	108.841.604.456	107.206.430.621	98,50%
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.107.798.848	3.919.660.936	95,42%
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	139.200.000	125.399.046	90,09%
	2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	75.000.000	74.781.000	99,71%
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	202.354.000	201.184.000	99,42%
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	39.496.148	39.397.500	99,75%

	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	78.000.000	77.893.000	99,86%
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	139.092.400	138.928.500	99,88%
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98.029.000	97.805.700	99,77%
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.500.000	92.449.800	80,04%
	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	14.963.000	99,75%
	10	Penyediaan Makan dan Minum	115.000.000	114.888.500	99,90%
	11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	199.550.000	199.074.126	99,76%
	12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	79.250.000	78.960.000	99,63%
	13	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	63.617.750	59.327.000	93,26%
	14	Penyediaan Biaya Operasional unit kerja bawahan	250.000.000	241.636.682	96,65%
	15	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	1.243.487.950	1.190.500.000	95,74%
	16	Peringatan Hari-hari Besar nasional	37.500.000	32.691.000	87,18%
	17	Operasional Tim MPP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.480.000	31.480.000	100,00%
	18	Operasional UPTD Pendidikan dan Kebudayaan	1.186.241.600	1.108.302.082	93,43%
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.584.209.000	3.488.135.903	97,32%
	1	Rehabilitas Kantor UPTD Pendidikan Pancung Soal	150.000.000	148.520.000	99,01%
	2	Rehabilitas Kantor UPTD Pendidikan Bayang	200.000.000	198.034.900	99,02%
	3	Rehabilitas Kantor UPTD Pendidikan Batang Kapas	200.000.000	198.239.500	99,12%
	4	Rehabilitas Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Sutura (Lanjutan)	150.000.000	148.530.000	99,02%
	5	Rehabilitas Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Basa Ampek Balai	300.000.000	259.215.000	86,41%
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100.000.000	92.031.000	92,03%
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	135.409.000	133.215.603	98,38%
	8	Pemeliharaan Rutin /Berkala Alat-Alat Kantor	83.800.000	83.637.000	99,81%
	9	Pembangunan Pagar	1.815.000.000	1.780.780.000	98,11%
	10	Rehabilitas Kantor UPTD Pendidikan IV Jurai	200.000.000	198.340.000	99,17%
	11	Rehabilitas Kantor UPTD Pendidikan Lengayang	100.000.000	99.070.000	99,07%
	12	Rehabilitas Kantor UPTD Pendidikan Ranah Pesisir	150.000.000	148.522.900	99,02%
3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	270.917.500	265.369.969	97,95%
	1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	50.000.000	49.997.269	99,99%

	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	74.916.000	74.916.000	100,00%
	3	Pelatihan Penatausahaan Keuangan Unit Bawahan	146.001.500	140.456.700	96,20%
4		PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	973.464.000	966.285.200	99,26%
	1	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	118.464.000	116.964.000	98,73%
	2	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini	80.000.000	80.000.000	100,00%
	3	Lomba Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak	175.000.000	173.814.400	99,32%
	4	Magang Tenaga Pendidikan PAUD	250.000.000	247.628.000	99,05%
	5	Pelatihan Verifikasi Bantuan Program PTK PAUD	150.000.000	150.000.000	100,00%
	6	Pembangunan Gedung Paud Lunang	200.000.000	197.878.800	98,94%
5		PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	83.109.473.875	82.521.830.557	99,29%
	1	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	149.963.000	148.419.000	98,97%
	2	Rehabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah	178.750.000	173.001.100	96,78%
	3	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	230.255.500	224.265.000	97,40%
	4	Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa	289.709.850	289.616.200	99,97%
	5	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	199.978.850	173.102.850	86,56%
	6	Bimbingan Teknis Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti	150.000.000	140.755.050	93,84%
	7	Pembangunan/Rehabilitas Gedung Dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK 2017)	3.767.000.000	3.767.000.000	100,00%
	8	Pembangunan / Rehabilitas Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (Penunjang DAK 2017)	113.000.000	106.782.700	94,50%
	9	Pembangunan / Rehabilitas Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK 2017)	3.312.000.000	3.311.717.000	99,99%
	10	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (Penunjang DAK 2017)	107.625.000	91.691.000	85,19%
	11	Pendidikan Karakter SD dan SMP	109.715.500	109.715.100	100,00%
	12	Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD dan SMP	433.382.000	394.033.650	90,92%
	13	Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	74.826.100	74.757.550	99,91%
	14	Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar	491.382.225	473.351.375	96,33%
	15	Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	498.962.000	393.245.095	78,81%
	16	Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	507.039.900	494.042.000	97,44%
	17	Monitoring,Evaluasi dan laporan Dana BOS	187.950.000	170.591.950	90,76%
	18	Pembinaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif	114.511.600	69.801.600	60,96%
	19	Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat	76.536.500	62.346.000	81,46%
	20	Pengadaan Meubeluer Sekolah	1.726.299.950	1.726.136.325	99,99%

21	Operasional Sarana Mobilitas Sekolah Di daerah Terpencil	268.185.900	244.486.750	91,16%
22	Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD)	47.098.400.000	47.098.400.000	100,00%
23	Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	20.223.000.000	20.223.000.000	100,00%
24	Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) SMP 1 Lengayang (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017) Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) SMP 1 Lengayang (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)	150.000.000	144.370.000	96,25%
25	Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) SMP 1 Pancung Soal (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)	150.000.000	144.599.000	96,40%
26	Pembuatan Pagar SMP 1 Kec. IV Nagari Bayang Utara Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)	200.000.000	197.360.000	98,68%
27	Pembuatan Pagar dan Gerbang SMPN 1 Lumpo Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)	175.000.000	172.510.000	98,58%
28	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 5 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)	125.000.000	123.219.900	98,58%
29	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 4 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)	150.000.000	147.950.000	98,63%
30	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)	115.000.000	113.422.250	98,63%
31	Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik SMPN 3 Kapujan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)	150.000.000	144.359.000	96,24%
32	Pengadaan Alat Drumband Sekolah	150.000.000	144.636.000	96,42%
33	Pengadaan Komputer untuk UNBK Jenjang SMP	536.000.000	526.755.912	98,28%
34	Pembangunan Pagar SDN 23 Sawah Liat	150.000.000	147.874.950	98,58%
35	Pengadaan Mobiler SDN 06 Damar Rumput dan SDN 10 Air Pura	150.000.000	149.606.250	99,74%
36	Rehabilitasi SDN 19 Talang Tan Saidi Lengayang	100.000.000	98.720.000	98,72%
37	Rehabilitasi SDN 28 Pasar Surantih	200.000.000	10.000.000	5,00%
38	Pembangunan Ruang Kelas Baru (Luncuran DAK 2017)	300.000.000	296.190.000	98,73%
6	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	1.189.987.600	1.179.058.100	99,08%
1	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	45.000.000	45.000.000	100,00%
2	Pengembangan pendidikan keaksaraan	274.670.400	268.870.400	97,89%
3	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	-	-	
4	Peningkatan Kualitas Pengelolaan LKP/PKBM	150.000.000	149.675.000	99,78%

	5	Retrival dan Transisi	83.261.750	83.261.750	100,00%
	6	Penyelenggaraan Paket C	216.705.000	215.292.250	99,35%
	7	Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga	180.000.000	179.892.200	99,94%
	8	Pelaksanaan UNPK Paket B	45.000.000	44.865.000	99,70%
	9	Pelaksanaan UNPK Paket C	55.000.000	54.975.000	99,95%
	10	Pelatihan Tutor Paket C	140.350.450	137.226.500	97,77%
7		PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA	97.791.100	72.069.600	73,70%
	1	Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Luar Biasa	97.791.100	72.069.600	73,70%
8		PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.781.766.053	2.489.990.050	89,51%
	1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	141.422.150	134.077.650	94,81%
	2	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	385.512.651	358.226.100	92,92%
	3	Pembinaan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Guru(PPPG)	365.000.000	364.742.250	99,93%
	4	Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	272.600.750	254.507.500	93,36%
	5	Pengembangan Sistem Pendataan, Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	75.265.250	63.347.750	84,17%
	6	Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	507.935.502	499.220.250	98,28%
	7	Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik	222.141.300	214.603.250	96,61%
	8	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik	579.714.700	376.293.550	64,91%
	9	Sosialisasi Juknis pelaksanaan Jabatan Fungsional guru dan Angka kredit Guru	140.923.750	133.771.750	94,92%
	10	Pembinaan Tim Evaluasi Pembuatan Master Soal Pendidikan Dasar	91.250.000	91.200.000	99,95%
9		PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	9.443.312.880	9.083.142.247	96,19%
	1	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	76.219.250	71.435.125	93,72%
	2	Monitoring,Evaluasi Dan Pelaporan	105.931.000	94.933.500	89,62%
	3	Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS	8.437.500.000	8.169.750.000	96,83%
	4	Sosialisasi Dan Updating Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)	153.706.250	144.567.110	94,05%
	5	Penyelenggaraan Akademi Komunitas	669.956.380	602.456.512	89,92%
10		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	1.932.376.600	1.877.648.700	97,17%
	1	Peragaan Dan Dokumentasian Tari Benten Oleh Sanggar Seni Sekabupaten Pesisir Selatan Dalam rangka Pelestarian tari Tradisional	334.325.000	333.518.250	99,76%
	2	Produksi Film Layar lebar Dokudrama	220.022.000	216.470.950	98,39%
	3	Pelatihan Dan Pembinaan Sanggar Seni Se Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Pengabdian Masyarakat	154.353.200	142.350.950	92,22%
	4	Pelatihan Dan Pembinaan Guru Seni Budaya Tingkat SD Se Kabupaten Pesisir Selatan	64.042.400	47.315.900	73,88%
	5	Pelatihan Dan Pembinaan Guru Seni Budaya Tingkat SMP dan SMA Sekabupaten Pesisir Selatan	46.713.500	42.762.150	91,54%
	6	Pengiriman Tim Kesenian	395.000.000	392.546.250	99,38%

	7	Pelatihan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Khitab Bullah (Guru Budaya Alam minang kabau Se-Kabupaten. TK, SLTP, Lanjutan	79.622.500	76.322.500	95,86%
	8	Pelatihan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Khitab Bullah Tingkat Umum	64.581.500	59.510.250	92,15%
	9	Sumarak Pesisir Selatan Dengan Kegiatan	396.112.500	390.497.500	98,58%
	10	Penyusunan Buku Kerjaan - Kerjaan Lokal Pesisir Selatan	177.604.000	176.354.000	99,30%
11		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	1.350.507.000	1.343.239.359	99,46%
	1	Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air	119.247.000	119.247.000	100,00%
	2	Pembuatan Film Dokumenter	150.000.000	148.419.900	98,95%
	3	Perawatan Cagar Budaya, Museum Dan Peninggalan Bawah Air	64.678.500	64.678.500	100,00%
	4	Pengadaan Alat - Alat kesenian Dan Pakaian Adat	103.000.000	98.903.000	96,02%
	5	Penampilan Paket Seni Modern Dan Tradisional	665.882.900	664.466.900	99,79%
	6	Pendataan Assesment serta Penetapan Legalitas Cagar Budaya, Museum dan Peninggalan Bawah Air	75.000.000	75.000.000	100,00%
	7	Produksi dan Penayangan Seni Tari Tradisional Kabupaten Pesisir Selatan di Televisi	172.698.600	172.524.059	99,90%

B.

REALISASI PROGRAM DAN

KEGIATAN

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Alokasi dana sebesar Rp. 4.107.798.848,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.919.660.936,- atau sebesar 95,42%. bertujuan untuk penyediaan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penyediaan biaya jasa inventarisir dan pengelolaan Aset Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD /SKB dan SD/SMP/SMA/SMK se kabupaten Pesisir Selatan, penyediaan biaya jasa pengelolah keuangan khususnya Operator SIKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan Alat Tulis kantor guna pelayanan administrasi perkantoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen kantor, tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Gedung, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan, penyediaan makan minum pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penyediaan pembiayaan perjalanan Dinas

Pegawai keluar daerah, belanja perjalanan Dinas pegawai di dalam daerah, Biaya Operasional UPTD, SKB dan TK Negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Manfaat. dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu terpenuhinya kebutuhan akan layanan administrasi penganggaran dan keuangan kegiatan pembangunan bidang pendidikan secara tepat. Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Terwujudnya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan secara baik

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan Alokasi dana sebesar Rp. 3.584.209.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.488.135.903,- atau sebesar 97,32%. bertujuan untuk penyediaan Meubiler Sekolah sebanyak 25 Paket untuk 125 ruangan SD,SMP dan SMA/SMK se Kabupaten Pesisir Selatan, penyediaan belanja pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor, penyediaan belanja pemeliharaan kendaraan dinas kantor dan BBM Operasional yang terdiri dari 3 mobil Dinas dan 13 motor, penyediaan belanja pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor, penyediaan belanja pemeliharaan rutin alat-alat kantor, Pengadaan Alat Pendingin, Pengadaan alat penyimpanan Perlengkapan kantor, Pengadaan Peralatan Personal Komputer, Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Pengadaan umbul-umbul/bendera.

Manfaat Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yaitu Meningkatnya tata kelola layanan administrasi perkantoran dan penggunaan sarana dan prasarana aparatur dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang pendidikan. Capaian Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yaitu Terwujudnya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan secara baik.

Prestasi yang Diperoleh dari hasil Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur: Adanya peningkatan ketersediaan sarana-prasarana aparatur, serta terjadinya penambahan umur ekonomi dari sarana-prasarana aparatur yang telah ada sarana-prasarana aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan Alokasi dana sebesar Rp. 270.917.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 265.369.969,- atau sebesar 97,95%. bertujuan untuk penyediaan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pelaksanaan Bimtek Kepala 150 orang kepala sekolah tentang Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan bimtek untuk bendahara sekolah tentang pelaksanaan anggaran.

Manfaat Program ini yaitu Meningkatnya pengetahuan tentang ketentuan, peraturan dan perundangan yang terkait dengan bidang tugas aparatur., sehingga dalam menjalankan tugas pokok berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel.

Capaian Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu terjadinya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di tingkat provinsi dan nasional dengan kabupaten secara baik.

Prestasi Yang Diperoleh Dari Hasil Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Yaitu Peningkatan kualitas layanan dan/atau pekerja administrasi perkantoran, tata kelola keuangan dan aset terlaksana dengan baik dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan Alokasi dana sebesar Rp. 973.464.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 966.285.200,- atau sebesar 99,26% Program ini bertujuan untuk Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD sebanyak 3 angkatan, , pengadaan Lomba Kreatifitas TK dan PAUD, Jambore Anak Usia Dini, Jambore Pendidik PAUD dan Hari Anak Nasional, Manfaat Program Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Terjadinya peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD, dan peningkatan motivasi dan kepedulian masyarakat akan pendidikan dan perkembangan anak usia pendidikan dini mengikutkan anak untuk mengikuti program pendidikan , sehingga bertambahnya lembaga dan peserta didik.

Capaian Program Pendidikan Anak Usia Dini Dengan Tingkat Propinsi Atau Nasiona Peran serta pelaksanaan Jambore PAUDNI tkt provinsi pada bidang lomba Penampilan Tari juara II dan Jambore PTK PAUDNI tkt provinsi bidang lomba Pelaksanaan Pembelajaran PAUD. memperoleh juara II.

Prestasi Yang Diperoleh Dari Hasil Program ini adalah APK Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Pesisir Selatan diperingkat 2 Provinsi Sumatera Barat .

5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun dengan Alokasi dana sebesar Rp 83.109.473.875,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.521.830.557,- atau sebesar 99,29%. Program ini merupakan program nasional berupa penyelenggaraan pendidikan sampai minimal sembilan tahun yang bertujuan untuk melaksanakan pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat pesisir selatan. Komponen dasar yang diselenggarakan berupa penyelenggaraan Pendidikan tingkat SD dan tingkat SMP, serta perbaikan sarana dan prasarana jenjang SD dan SMP. Kegiatan nya diantaranya berupa Pelaksanaan Akreditasi Sekolah, Rehabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah, Pelatihan Penyusunan Kurikulum, Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa, Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar,

Bimbingan Teknis Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti, Pembangunan/Rehabilitas Gedung Dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK 2017), Pembangunan / Rehabilitas Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (Penunjang DAK 2017), Pembangunan / Rehabilitas Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK 2017), Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (Penunjang DAK 2017), Pendidikan Karakter SD dan SMP, Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD dan SMP, Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar, Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Monitoring,Evaluasi dan laporan Dana BOS, Pembinaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat, Pengadaan Meubeluer Sekolah, Operasional Sarana Mobilitas Sekolah Di daerah Terpencil, Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD), Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) SMP 1 Lengayang (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017),

Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) SMP 1 Lengayang (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017), Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) SMP 1 Pancung Soal (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017), Pembuatan Pagar SMP 1 Kec. IV Nagari Bayang Utara Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017), Pembuatan Pagar dan Gerbang SMPN 1 Lumpo Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017), Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 5 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017), Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 4 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017), Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017), Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik SMPN 3 Kapujan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017), Pengadaan Alat Drumband Sekolah, Pengadaan Komputer untuk UNBK Jenjang SMP, Pembangunan Pagar SDN 23 Sawah Liat, Pengadaan Mobiler SDN 06 Damar Rumput dan SDN 10 Air Pura, Rehabilitasi SDN 19 Talang Tan Saidi Lengayang, Rehabilitasi SDN 28 Pasar Surantih, Pembangunan Ruang Kelas Baru (Luncuran DAK 2017). Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar, Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Operasional sarana mobilitas sekolah di daerah terpencil Pelaksanaan Akreditasi Sekolah, Pelatihan Penyusunan Kurikulum, Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar, Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Pertama, Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, , pembiayaan perbaikan dan Operasional transportasi laut (motor boat) SMPN 6 Koto XI tarusan, biaya penilaian dan ujian akreditasi 25 sekolah SD se Kabupaten Pesisir Selatan, penyediaan Penunjang Biaya Operasional Sekolah Kecil untuk SD dan SMP, menyelenggarakan lomba dan kreativitas siswa jenjang SD dan SMP, melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS SD dan SMP dengan sasaran 382 SD dan 74 SMP se Kabupaten Pesisir Selatan, menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar berupa ujian UN, Pra UN dan

UAS, menyelenggarakan pendidikan SMP berupa Ujian Akhir Sekolah Menengah Pertama (UAS SMP) dan try out, menyelenggarakan lomba dan kreativitas siswa jenjang SD, menyelenggarakan lomba siswa jenjang SMP berupa lomba pidato dan debat bahasa Inggris bagi siswa SMP se Kabupaten Pesisir Selatan, pengadaan Alat Peraga/Pratek sekolah serta untuk pengadaan Komputer dan perlengkapan media pembelajaran di Kabupaten Pesisir Selatan, pengadaan Alat Peraga/Pratek sekolah serta untuk pengadaan Komputer dan perlengkapan media pembelajaran di Kabupaten Pesisir Selatan. Manfaat dan dampak dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun adalah merupakan hasil dari pelaksanaan Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2017 yang memberikan arti sangat signifikan dalam kemajuan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan, seiring dengan peningkatan daya saing secara global dalam mempersiapkan sumber daya manusia sedini mungkin. Pendidikan karakter begitu penting, dengan piloting pendidikan karakter pada SDN 21 Limau Sundai dan SMPN 1 Painan telah terjadi dampak yang dapat terlihat dalam keseharian di lingkungan sekolah pada aktifitas sopan santun, saling menghargai, bersosial kerjasama, disiplin belajar, beribadah, berakhlak, bersiap, mencintai tanah air dalam belah negara dan lainnya hal ini menngimbas dirumah serta dimasyarakat. Capaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yaitu Terjadinya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di tingkat provinsi dan nasional dengan kabupaten secara baik, dengan capaian seperti akreditasi sekolah SD telah terakreditasi 326 dari 384 ketercapaian 85%, SMP 90 % terakreditasi, sebanyak 67 sekolah dan SMA 100% terakreditasi dan SMK sebahagian program studi belum terakreditasi. BinteK Kurikulum 2013 ketercapaian pelatihan kurikulum 2013 guru SD baru telah mencapai 75% , Guru SMP tercapai 70% dan Guru SMA/SMK tercapai 65% dan penilaian Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang Pendidikan SD, SMP, tercapai 85% dan SMA dan SMK tercapai 90 % ,

Adapun prestasi yang diperoleh dari hasil Program Lomba Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berada pada peringkat 12 dari 19 Kabupaten /Kota Sumatera Barat, sedangkan prestasi menyelenggarakan lomba SLB pada Bidang Non Akademik O2SN pada cabang kursi roda

tahun 2017 baru peringkat 1 sumbar dan tingkat nasional pada posisi 10 besar..

6. Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Non Formal dengan Alokasi dana sebesar Rp. 1.189.987.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.179.058.100,- atau sebesar 99,08%. Program ini merupakan Pelaksanaan pendidikan di luar Sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah maupun oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang bertujuan untuk melayani dan memberikan pendidikan Non Formal dan informal kepada Masyarakat untuk meningkatkan Angka Melek Huruf dan rata-rata lama sekolah yang merupakan dua dari empat indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) . Adapun Kegiatan nya berupa menyelenggarakan Paket B setara SLTP dengan sasaran 6 kelompok PKBM yang terdiri dari 120 orang siswa, menyelenggarakan Paket C setara SMU dengan sasaran 6 kelompok belajar dengan peserta 120 orang, Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal mengadakan Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional, dengan sasaran 30 orang tutor KF Di Kab.Pesisir Selatan, penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional di kabupaten Pesisir Selatan guna penuntasan buta aksara latin. Sararan kegiatan ini sebanyak 1.200 orang buta aksara, biaya operasional pengiriman kontingen dan pembuatan Stand Pesisir Selatan pada kegiatan Lomba Hari Aksara Internasional tingkat Sumatera Barat Peningkatan Kualitas Pengelolaan LKP/PKBM, dan Pelaksanaan Kegiatan Menyekolahkan kembali Anak Putus Sekolah sebanyak 60 orang dari Jenjang SMP dan SMA/SMK. Adapun Prestasi Program ini berupa meningkatnya Angka melek huruf dari 97,41 % di tahun 2014 menjadi 98,12 % ditahun 2017.

7. Program Pendidikan Luar Biasa

Program Pendidikan Luar Biasa dengan Alokasi dana sebesar Rp. 97.791.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 72.069.600,-atau sebesar 73,70%. dengan capaian fisik sebesar 100 %. Program ini merupakan kegiatan penyelenggaran pendidikan untuk siswa berkebutuhan Khusus sehingga setara dengan Pendidikan formal lainnya. Pada tahun 2017

kegiatannya hanya satu yaitu berupa kegiatan lomba bagi Sekolah LB ditingkat kabupaten dan tingkat Propinsi.

Capaian Program Pendidikan Luar Biasa yaitu menyelenggarakan lomba dan kreativitas siswa jenjang SLB baik (SDLB atau SMPLB dan SMALB) terkait Olimpiade Akademik (OSN, MIPA,) maupun Bidang Non Akademik (O2SN, FLS2N) tahun 2014 baru 80%, karena ada lomba yang tidak dapat diikuti dan anggaran belum tersedia

8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Alokasi dana sebesar Rp. 2.781.766.053,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.489.990.050,- atau sebesar 89,51%. Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kompetensi dan memberikan reward bagi tenaga pendidik (guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah). Kegiatannya berupa melakukan pendataan dan verifikasi sertifikasi pendidik, pelatihan calon kepala Sekolah, mewadahi MGMP SMP dan SMA se kabupaten Pesisir Selatan, penilain kinerja kepala Sekolah dan manajemen oleh pengawas sekolah se kabupaten Pesisir Selatan, memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik (Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah) berpretasi, tingkat Kabupaten Pesisir selatan, Pengelolaan Pendataan dan Pemet serta aan Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui SIM NUPTK, data NUPTK ini menjadi data awal untuk sertifikasi guru, kegiatan penilaian angka kredit guru guna kenaikan pangkat guru untuk periode April dan oktober,

Program ini bermanfaat untuk Terjadinya Penguatan terhadap kompetensi pengawas SD, dan SMP/SM yang akan memberikan layanan pembinaan terhadap sekolah binaan baik akademik atau manajerial terhadap guru dan kepala sekolah. Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru ini bermanfaat bagi seluruh guru sebagai media bertatap muka guru mata pelajaran sejenis dan/atau guru kelas secara terjadwal, untuk mendiskusikan permasalahan dan informasi terkini pelaksanaan tugas pokok.

Adapun prestasi Yang Diperoleh Dari Hasil Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik rekrutmen calon pengawas atau calon kepala sekolah, serta pelatihan guru mata pelajaran matematika dan bintek pengawas SD, SMP/SM memberikan kontribusi terhadap hail lulusan

peserta didik contoh tahun 2017 hasil UN SMA peringkat 1 sumbar dan hasil UN SMP peringkat 6 Sumatera Barat dari 19 Kabupaten /Kota. Kegiatan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, 31 (tiga puluh satu) orang guru telah mendapatkan Nomer Unik Kepala Sekolah (NUKS) dan 365 orang telah dinyatakan layak seleksi akademik yang akan mengikuti dikalut calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh lembaga tingkat nasional.

9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan Alokasi dana sebesar Rp. 9.443.312.880,- dan terealisasi sebesar Rp 9.083.142.247,- atau sebesar 96,19%. Program ini bertujuan untuk menciptakan manajemen Layanan pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan Pendidikan Sesuai Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2017. Adapun kegiatannya berupa Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan dengan adanya website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pelaksanaan Sosialisasi pengumpulan Data Pokok Pendidikan terhadap 515 orang Operator Pendataan jenjang SD, SMP, SMA/SMK dan UPTD se Kabupaten Pesisir Selatan, Seleksi calon Mahasiswa AK, Pelatihan calon PTK Akademi, pengadaan sarana pendukung belajar dan pemberian bantuan transportasi dosen dan 120 mahasiswa Akademi Komunitas.

Manfaat Program ini diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Operasional dan pelayanan dapodik dengan sistem TIK, tersedianya informasi program melalui web disdik pessel. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Sosialisasi dan Updating Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Penyelenggaraan Akademi Komunitas.

Capaian Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dapat terlaksana secara baik serta bersinergi dengan tingkat provinsi dan nasional. Ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik sesuai dengan target yang direncanakan.

11. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program pengelolaan kekayaan budaya berisikan kegiatan- kegiatan seperti pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum bawah air, kegiatan perawatan cagar budaya museum dan peninggalan bawah air, kegiatan pengiriman tim kesenian ke propinsi dan luar propins, kegiatan pengadaan alat-alat kesenian berupa alat musik dan baju tradisional, kegiatan pembuatan booklet benda cagar budaya kabupaten pesisir selatan, kegiatan sumarak pesisir selatan dalam rangka memperingati hari jadi pesisir selatan setiap tanggal 15 april, kegiatan pelatihan adat basandih sara', sara' basandi kitabullah dengan sasaran siswa jenjang SD sampai SMA, kegiatan pelatihan muatan lokal BAM bagi siswa SD, SLTP dan SLTA, kegiatan pendataan seni dan tari tradisional, kegiatan pelatihan produksi seni pertunjukan sanggar, kegiatan pembinaan seni tradisional bagi tenaga pendidik dan siswa-siswi SMA/SMK/SMP, kegiatan penampilan seni tradisional randai se kecamatan koto XI tarusan di kawasan mande, kegiatan penampilan paket seni tradisional dan modren dan kegiatan persiapan dan koordinasi carocok internasional dance festival serta kegiatan pengadaan peralatan studio video dan film.